



Kepariwisataan Indonesia, Desa Wisata

Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy

Juli 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pariwisata	6
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	8
2.3 Potensi Desa-Desa Wisata di Kabupaten Sekitar Danau Toba.....	10
BAB III KEPARIWISATAAN INDONESIA.....	13
3.1 Kepariwisata Indonesia.....	13
3.2 Kawasan Strategis	15
3.3 Usaha Pariwisata	16
3.4 Hak, Kewajiban, Wewenang, Koordinasi	16
3.5 Badan Promosi Pariwisata.....	22
BAB IV DESA WISATA	28
4.1 Desa Wisata.....	28
4.2 Penetapan Desa Wisata.....	31
4.3 Usaha Pariwisata di Desa Wisata	32
4.4 Pembangunan Desa Wisata (Bup-Karo, 2019).....	35

4.5	Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan.....	37
4.6	Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata	38
4.7	Hak dan Kewajiban Para Stakeholder	41
BAB V	DESA WISATA BAHARI.....	45
5.1	Pendahuluan	45
5.2	Penentuan Desa Wisata Bahari.....	45
5.3	Rencana Aksi.....	50
5.4	Pelaksanaan	52
5.5	Monitoring dan Evaluasi	53
BAB VI	KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	55
6.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	55
6.2	Pembangunan Destinasi Pariwisata.....	57
6.3	Arah dan Strategi Kebijakan.....	63
6.4	Pembangunan Pemasaran Kepariwisata Daerah.....	72
6.5	Pembangunan Industri Kepariwisata Daerah.....	73
6.5	Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi ..	77
BAB VII	KAWASAN WISATA PRIORITAS.....	80
7.1	Daya Saing Pariwisata Indonesia	80
7.2	Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan.....	83
7.3	Tiga Destinasi Wisata Prioritas	92

BAB VIII PENGELOLAAN DANAU TOBA.....	96
8.1 Pendahuluan	96
8.2 Pengembangan Destinasi Danau Toba	98
8.3 Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.....	100
PENUTUP	111
GLOSARIUM	114
REFERENSI.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Kelas Desa Bahari Berdasarkan Indikator	47
Tabel 2. Peringkat Daya Saing Perjalanan dan Wisata Indonesia...	81
Tabel 3. Batasan Destinasi Wisata Prioritas dan Kawasan Inti Pariwisata	93
Tabel 4. Provinsi dan Kota/Kabupaten yang memenuhi persyaratan dan dapat berpartisipasi di dalam P3TB.....	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Desa-Desa yang Memiliki Daya Tarik Wisata.....	12
Gambar 2. Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	62
Gambar 3. Peta Kawasan Inti Prioritas Danau Toba, Sumatera Utara	97
Gambar 4. Proyeksi Pengunjung dan Perkiraan Belanja Tahunan Pengunjung, 2015-2041	99
Gambar 5. Peta Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba	100

RINGKASAN

Perkembangan industri pariwisata semakin kompetitif dengan keadaan pasar yang semakin dinamis. Pembangunan kepariwisataan Indonesia harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam peta global. Perlu adanya perubahan paradigma dan penegasan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kepariwisataan Indonesia, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokalnya, seperti dalam pengembangan desa-desa wisata. Studi pada buku ini bertujuan menggali arah dan keinginan pemerintah secara detail terhadap pengembangan pariwisata yang dilakukan dengan metode normatif, dengan melihat berbagai aturan dan peraturan yang ada, khususnya dalam pengembangan di Kawasan Wisata Super Prioritas Danau Toba.

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan untuk peningkatan pendapatan nasional tidak dapat lagi diharapkan terutama dari sektor minyak dan gas. Saat ini sektor non migas perlu ditingkatkan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pembangunan pariwisata merupakan pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu pembangunan yang dilakukan dan menjadi program prioritas pemerintah adalah Desa Wisata. (Desa-Nita, 2014)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat Paradigma baru pembangunan pariwisata. Target yang ditetapkan untuk pembangunan pariwisata saat ini adalah berorientasi pada target penghasilan masyarakat dari pariwisata, berubah dari RPJMN tahun 2015-2019 yang berorientasi pada jumlah kedatangan wisatawan baik lokal maupun mancanegara (Drajat, 2019). Menghadapi perubahan orientasi tersebut, Bappenas telah menyusun Rancangan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata 2020-2024 dengan sasaran

meningkatnya citra, daya saing, dan kontribusi pariwisata dalam mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan pariwisata melalui empat bidang, yaitu: Peningkatan daya saing industri dan ekosistem usaha pariwisata; Peningkatan aksesibilitas, amenities, atraksi, dan tata kelola destinasi pariwisata; Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pariwisata; serta Penguatan citra pariwisata dan diversifikasi pemasaran.

Dalam penyelenggaraan Kepariwisataan di Inonesia terdapat prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepariwisataan Tahun 2009 (UU-RI, 2009), yaitu: Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; Memberdayakan masyarakat setempat; Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; Mematuhi Kode Etik Kepariwisataan Dunia dan kesepakatan internasional di bidang pariwisata; dan Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasankawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi

perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing. (PP-RI, 2011).

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian. (PP-RI, 2011).

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar, yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah ke depan untuk menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan. Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan.

Sektor pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan. (PP-RI, 2011).

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Indonesia harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Indonesia dalam peta Kepariwisataan regional maupun internasional. Prinsip-prinsip dan target pemerintah terhadap program pariwisata ini sangat cocok direalisasikan melalui pengembangan Desa Wisata. Dari paparan di atas maka perlu adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh kepariwisataan Indonesia, terutama dalam pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokalnya. Studi pada buku ini bertujuan menggali arah dan keinginan pemerintah secara detail terhadap pengembangan kepariwisataan yang dilakukan dengan metode normatif, dilihat dari aturan dan peraturan yang ada, khususnya dalam pengembangan di Kawasan Wisata Super Prioritas Danau Toba.

1.2 Permasalahan dan Metode Penelitian

Permasalahan Penelitian

Banyak potensi wisata tidak dapat dimanfaatkan maksimal karena kesalahan dalam pengelolaan dan pengembangan. Perlu dicari jalan keluar bagaimana mengembangkan potensi wisata secara efektif dan berhasil. Karena itu permasalahan penelitian adalah bagaimanakah konsep strategi tepat yang mendasari perkembangan desa-desa wisata di sekitar Kawasan Danau Toba sebagai konsep yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Selain itu pemberdayaan masyarakat lokal juga harus dilibatkan sepenuhnya agar pembangunan pariwisata tersebut berdampak kepada perekonomian mereka.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan pada studi ini adalah dengan melakukan kajian normatif, dimana pengkajian permasalahan dan pembahasannya diperoleh melalui studi literatur, terutama peraturan-peraturan mengenai kepariwisataan dan desa wisata yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah beberapa dokumen dan literature serta berbagai diskusi yang dilakukan. Sumber utama studi ini adalah Undang-Undang Kepariwisataan (UU N0.10 Tahun 2009), Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata, dan Peraturan Desa Nita Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Desa Wisata.

GLOSARIUM

Pemerintah Pusat atau Pemerintah	Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menteri Pariwisata	Adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
Pemerintah Daerah	Adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintah Desa	Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pemangku kepentingan	Para pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata perdesaan.
Wisata	Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
Wisatawan	Orang yang melakukan wisata.
Pariwisata	Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.



Kepariwisataan	Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
Pembangunan pariwisata	Pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Daya Tarik Wisata	Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Daerah tujuan pariwisata atau Destinasi Pariwisata	Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Kawasan Strategis Pariwisata	Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Pengusaha Pariwisata	Perseorangan atau sekelompok orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
Produk Pariwisata	Berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
Pemasaran pariwisata	Upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
Atraksi pariwisata	Segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.

Pariwisata Desa	Bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
Desa Wisata	Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
Desa Wisata	Wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
Wisata Desa	Kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau travel, tinggal dalam atau dekat suasana tradisional di kawasan desa menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan perdesaan serta lingkungan setempat.
Destinasi Desa Wisata	Kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
Pengelola Desa Wisata	Pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
Wisata budaya	Kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
Wisata agro	Kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
Wisata tirta	Kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan
Wisata alam	Kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya agar ada daya tarik wisata setempat tersebut.



Kompetensi	Seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
Sertifikasi	Proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
Pemanfaatan	Segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan	Upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Penataan	Upaya dinamis untuk menjaga dan memelihara potensi dan sumber daya wisata dalam penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dalam penerapan prinsip kelayakan ekonomi, kesehatan lingkungan, keadilan sosial dan kemasyarakatan.
Pengelolaan	Upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Desa	Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Kepala Desa	Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata Pengusaha pariwisata desa	Organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata desa. Disebut juga Ormas Pariwisata. Masyarakat setempat dan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
Tradisi Budaya	Sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat
Kearifan Lokal	Ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
Upacara tradisional	Peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
Cerita rakyat	Cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
Permainan rakyat	Suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
Kerajinan lokal	Kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
Pergelaran budaya	Suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
Cagar Budaya	Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,



	pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Situs Budaya	Lokasi yang mengandung benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
Sanggar Budaya	Tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
Galeri Budaya	Tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan seni budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
Gelanggang seni	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
Gelanggang olahraga	Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
Usaha Pariwisata	Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP	Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
Industri Pariwisata	Kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
Usaha Daya Tarik Wisata	Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
Usaha Kawasan Wisata	Merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
Usaha Informasi Wisata	Merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Usaha Akomodasi Wisata	Merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
Usaha Kuliner	Merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
Pondok Wisata	Merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

REFERENSI

- Andy H. (2020). Tahapan Merintis dan Mengembangkan Desa Wisata [Internet]. ETICON. Available from: <https://eticon.co.id/author/hannif-andy/>
- Bappenas. (2020). *Integrated Tourism Masterplan for Danau Toba*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- BPIW. (2017). Inkubasi Kawasan Danau Toba. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Pusat Perencanaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta. Available from: http://bpiw.pu.go.id/product/download_attachments?file=Dokumen%20Profil%20Pengembangan%20Kawasan%20Strategis%20%20Resume%20Kawasan%20Danau%20Toba.pdf.
- Drajat, Herry. (2019). Target Pariwisata Tidak Lagi pada Jumlah Kedatangan Wisatawan, *venuemagz.com*, 22 April 2019. Available from: <https://venuemagz.com/news/target-pariwisata-tidak-lagi-pada-jumlah-kedatangan-wisatawan/>.
- Hartoyo, Djoko. (2020). Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Harus ada Harmonisasi Antar Sektor. Buletin Sinergi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Januari-Februari 2020.
- Heap, Brian. (2015). Essays, Research Associate of the Centre of Development Studies. University of Cambridge, by Banson, 27 Devonshire Road, Cambridge.
- Helmita, Sari O.N., Julianti N.T., Dwinata J. (2021). Pengembangan Desa Wisata Berkonsep Smart Tourism Melalui Pemberdayaan Kompetensi Masyarakat Desa Pujorahayu. *Jurnal Gentiaras Manajemen dan Akuntansi*, 13(1), 037 – 049.

- Herdiana, Dian. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages. *IPTEK-KOM*, 21(1), 1 – 16. DOI: <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019>
- Horwath HTL-Lombok. (2017). Market Analysis and Demand Assessment for Lombok. Available from: http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf
- Horwath HTL-Borobudur. (2017). Market Analysis and Demand Assessment for Borobudur. Available from: http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Borobudur_Market_and_Demand_Assessment.pdf
- Horwath HTL-Toba. (2017). Market Analysis and Demand Assessment for Lake Toba. Available from: http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lake_Toba_Market_and_Demand_Assessment.pdf
- Jafar A., dan Resnawaty R., (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 1-140. DOI:10.24198/jppm.v4i1.14208
- Kagungan D. (2019). Kebijakan Penata Kelolaan Pariwisata di Daerah Otonom Baru. Bandar Lampung, Pustaka Media.
- Kennedy P.S.J. (2017). Poster No.222: Pengelolaan Ekosistem Danau Toba Secara Berkelanjutan. In: *Prosiding Seminar Inovasi Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (SIMEA) Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila*.
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L, Toruan R.L. (2017). Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba melalui Strategi Pembangunan Infrastruktur Jalan Menggunakan Analisa Skenario Terbaik. In: *Prosiding Seminar Nasional dan CFP I IDRI Politeknik Negeri Ambon*.



- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L, Toruan R.L. (2022). Smart Tourism Concepts to be applied for the Lake Toba Tourism Area. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, Vol.6(1). DOI: <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.359>
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L, Toruan R.L., Manullang R.M. (2022). Smart Village Implementation Concept for Community Empowerment in Tourism Villages in the Lake Toba Region. *Proceeding ICHELSS 2022*, August 25, Jakarta.
- Kennedy P.S.J, Tobing S.J.L, Toruan R.L., Situmorang H., Manullang R.M. (2022). Story-Driven Marketing in the Attractions of Lake Toba, Storytelling: The Boru Naibaho Site and the Jabi-Jabi Tree. *Akinik Bookchapter. In Press.*
- Muawanah A. (2013). Definisi, komponen, dan sistem pariwisata. January 31, 2013. Available from: <https://annisamuawanah.wordpress.com/2013/01/31/definisi-komponen-dan-sistem-pariwisata/>
- Nuryanti, W. (1993). *Concept, Perspective and Challenges*. Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, Yudha. (2015). *Perubahan Perilaku Ekonomi Masyarakat Sebagai Dampak Pengembangan Pariwisata Alam Perdesaan: Studi Kasus Pemandu Wisata Air Terjun Nyarai Kecamatan Lubuk Alung, Provinsi Sumatera Barat*. Tesis, Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
- Sastrayuda GS. (2010). Konsep pengembangan kawasan desa wisata. Hand out mata kuliah concept resort and leisure [Internet]. Available from: http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA.pdf
- Subekti T., and Damayanti R. (2019). Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Desa Wisata: Studi pada Desa Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang. *Journal of Public Administration and Local Government JPALG*, 3(1), 18-28.

- Tobing SJL, Kennedy PSJ. (2017). Pengelolaan Ekosistem Danau Toba Secara Berkelanjutan (Sustainable Development). In: Prosiding Seminar Inovasi Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (SIMEA) Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
- Tobing SJL, Kennedy PSJ. (2017a). Pengembangan Pariwisata Danau Toba Ditinjau dari Kesiapan Akomodasi untuk Para Wisatawan. In: Prosiding Seminar Nasional dan CFP I IDRI Politeknik Negeri Ambon.
- Trinanda M.H. (2020). Tingkat kesiapan penerapan smart tourism dalam meningkatkan potensi sektor pariwisata pesisir di kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung, Studi Kasus Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Tugas akhir program studi perencanaan wilayah dan kota jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Lampung Selatan.
- UNWTO. (2011). Global Report on Women in Tourism. e World Tourism Organization (UNWTO) and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Madrid, Spain
- WEF. (2017). Travel and Tourism Competitiveness Report. World Economic Forum.
- WTTC. (2014). Gender Equality and Youth Employment. World Travel and Tourism Council.
- WTTC. (2015). Indonesia: How does Travel and Tourism compare to other sectors? World Travel and Tourism Council.
- Zakaria, F. & Suprihardjo, R.D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik Pomits, 3(2), 245-249



Perundang-Undangan dan Peraturan

- UU-RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- UU-RI. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Perpres-RI. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya
- Perpres-RI. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
- Perpres-RI. (2020). Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba Tahun 2020-2045, Arah Pembangunan 2020-2045.
- PP-RI. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025
- Permen-RI. (2017). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba.
- Permen-RI. (2020). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/Permen-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari
- BPIW, 2019. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor 02/SE/KW/2019 Tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB)
- Gubsu. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.

- Bup-Karo. 2019. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Desa Wisata
- Bup-Dairi. 2020. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Desa Wisata.
- Desa-Nita. (2014). Peraturan Desa Nita Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Desa Wisata